



Research Article

Respons Tafsir Hak Dini Kur'an Dili terhadap Kebijakan Politik Türkiye: Analisis Hermeneutika Gadamer

The Response of Tafsir Hak Dini Kur'an Dili to Turkish Political Policy: A Gadamerian Hermeneutic Analysis

Tafsir Hak Dini Kur'an Dili'nin Türk Siyasi Politikasına Yanıtı: Gadamer Hermeneutik Yaklaşımıyla Bir İnceleme

Azzam Ghufrani¹ ; Zulfikri^{2*} 

¹Department of Islamic Philosophy, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

²STIT Diniyyah Puteri Rahmah El-Yunusiyah, Indonesia

* Correspondence: zulfikri@stit-diniyyahputeri.ac.id

Received: 07.05.2026 | Revised: 29.05.2026 | Accepted: 04.06.2026 | Published: 05.06.2026

Copyright: © 2026 by the author(s). Published under the Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

Abstract: This article examines the response of Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır's exegetical work, *Hak Dini Kur'an Dili* (The True Religion's Language of the Qur'an), to the secularizing political policies of the early Turkish Republic. Situated at the intersection of Qur'anic studies and Turkish political history, this study employs a qualitative-descriptive method informed by Hans-Georg Gadamer's hermeneutics, focusing particularly on the concepts of pre-understanding (Vorverständnis) and horizon fusion (Horizontverschmelzung). The analysis reveals three dimensions of Hamdi's critical response: first, his theological resistance to the Turkish translation project, arguing that the linguistic beauty and legal authority of the Arabic Qur'an cannot be reproduced in any other language; second, his implicit critique of laicism (laiklik) through his commentary on Q. al-An'am 6:159, where he equates the separation of religion from public affairs with the fragmentation condemned in scripture; and third, his pragmatic accommodation of the republican system, evidenced in his interpretation of Q. al-Kawthar 108:3 as indicating that legitimate leadership need not rest on dynastic lineage. The article argues that Hamdi's tafsir constitutes a form of negotiated resistance, neither wholesale rejection nor uncritical compliance, toward the Kemalist political project. These findings carry comparative relevance for Indonesian scholarship, as Indonesian Qur'anic commentators have similarly navigated the intersection of religious authority and state secularism.

Keywords: *Elmalılı Hamdi Yazır; Hak Dini Kur'an Dili; Gadamerian hermeneutics; Qur'anic exegesis; Turkish political history.*

Özet: Bu makale, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın *Hak Dini Kur'an Dili* adlı tefsir eserinin, erken Cumhuriyet dönemindeki laik siyasi politikalara verdiği yanıtı incelemektedir. Kur'an araştırmaları ile Türk siyasi tarihi arasındaki kesişimde konumlanan bu çalışma, Hans-Georg Gadamer'ın hermeneutik yaklaşımını, özellikle ön-anlayış (Vorverständnis) ve ufuk kayışması (Horizontverschmelzung) kavramlarını esas alarak nitel-betimleyici bir yöntemle ele almaktadır. Analiz, Hamdi'nin eleştirel yanıtının üç boyutunu ortaya koymaktadır: birincisi, Arapça Kur'an'ın dil güzelliği ve hukuki otoritesinin başka bir dile aktarılamayacağı gerekçesiyle Türkçe tercüme projesine yönelik teolojik karşı çıkışı; ikincisi, En'am suresi 6:159'u üzerindeki yorumunda dinin kamusal alandan ayrıştırılmasını kutsal kitapta yargılanan parçalanmayla eşitleyen laiklik (laiklik) eleştirisi; üçüncüsü ise Kevser suresi 108:3'ü yorumunda meşru liderliğin soy bağına dayanmasının şart olmadığını vurgulayan pragmatik uyumudur. Makale, Hamdi'nin tefsirinin Kemalist siyasi projeye karşı bir müzakere edilmiş direnç biçimini ne tam bir red ne de eleştirisiz bir uyum temsil ettiğini öne sürmektedir. Bu bulgular, Endonezyalı mufassırların da benzer biçimde dini otorite ile devlet laikliği arasındaki kesişimi yaşadığı Güney Doğu Asya bağlamında karşılaştırmalı bir öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: *Elmalılı Hamdi Yazır; Hak Dini Kur'an Dili; Gadamer hermeneutik; Kur'an tefsiri; Türk siyasi tarihi.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji respons karya tafsir Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır, *Hak Dini Kur'an Dili*, terhadap kebijakan sekularisasi pada masa awal Republik Türkiye. Bertumpu pada persimpangan kajian al-Qur'an dan sejarah politik Türkiye, penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya konsep pra-pemahaman (Vorverständnis) dan penggabungan cakrawala (Horizontverschmelzung). Analisis mengungkap tiga dimensi respons kritis Hamdi: pertama, penolakan teologisnya terhadap proyek penerjemahan al-Qur'an ke

dalam bahasa Türkiye dengan argumen bahwa keindahan bahasa dan otoritas hukum al-Qur'an berbahasa Arab tidak dapat direproduksi dalam bahasa lain; kedua, kritik implisitnya terhadap laisisme (laiklik) melalui penafsiran QS. al-An'am 6:159, di mana ia menyamakan pemisahan agama dari urusan publik dengan perpecahan yang dikutuk dalam kitab suci; dan ketiga, akomodasi pragmatismenya terhadap sistem republik, sebagaimana tercermin dalam penafsirannya atas QS. al-Kautsar 108:3 yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang sah tidak harus bersandar pada garis keturunan. Artikel ini berargumen bahwa tafsir Hamdi merepresentasikan bentuk resistensi yang dinegosiasikan, bukan penolakan total maupun kepatuhan buta terhadap proyek politik Kemalis. Temuan ini memiliki relevansi komparatif bagi kajian Islam Indonesia, di mana para mufasir Indonesia juga menghadapi persimpangan serupa antara otoritas keagamaan dan sekularisme negara.

Kata Kunci: *Elmalılı Hamdi Yazır; Hak Dini Kur'an Dili; hermeneutika Gadamer; tafsir al-Qur'an; sejarah politik Türkiye.*

Pendahuluan

Dalam wacana akademis kajian Islam kontemporer, Türkiye sering diposisikan secara ambivalen: di satu sisi sebagai negeri Islam bersejarah yang mewarisi kejayaan Kesultanan Utsmani, di sisi lain sebagai negara Muslim pertama yang paling radikal menerapkan sekularisasi di dunia Islam pada abad ke-20. Kesultanan Utsmani, yang selama berabad-abad berfungsi sebagai pelindung kawasan Islam yang luas dan pengawal pemahaman Sunni, mengalami pergeseran arah yang dramatis ketika tekanan modernisasi Eropa—yang dipercepat oleh kekalahan dalam Perang Dunia I dan Perang Kemerdekaan (1919–1923)—memaksa rekonstruksi menyeluruh sistem kenegaraannya. Transformasi ini memuncak pada Republik Türkiye di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, yang menerapkan serangkaian kebijakan reformasi radikal: penghapusan kesultanan (1922) dan kekhalifahan (1924), pelarangan simbol-simbol keagamaan di ruang publik, transformasi alfabet Arab ke Latin (1928), serta penggantian hukum syariah dengan hukum perdata Swiss.

Pergeseran ini tidak hanya berdimensi institusional-politik, tetapi juga mengguncang tatanan intelektual para ulama Muslim Türkiye yang terdidik dalam tradisi madrasah Utsmani. Mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah: menolak kebijakan sekularisasi dan mengambil risiko marginalisasi, menerima kebijakan tersebut secara penuh, atau menemukan jalan ketiga berupa negosiasi yang memungkinkan kelangsungan tradisi keilmuan Islam di bawah kerangka negara sekuler baru. Di antara berbagai respons yang muncul, posisi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878–1942) patut mendapat perhatian khusus. Ia bukan ulama yang memilih konfrontasi terbuka seperti Said Nursi, tetapi juga bukan pemikir yang mengadopsi sekularisme secara ideologis. Sebaliknya, ia menerima mandat pemerintah untuk menulis tafsir al-Qur'an berbahasa Turki beraksara Latin—sebuah proyek yang merupakan bagian dari agenda nasionalisasi agama Kemalis—namun dalam proses penulisannya ia menyisipkan kritik teologis yang mendalam dan sistematis terhadap kebijakan-kebijakan yang sedang ia “layani”.

Karya tafsirnya, *Hak Dini Kur'an Dili* (Bahasa Al-Qur'an Agama yang Benar), dengan demikian menjadi dokumen yang sarat paradoks: sebuah teks yang lahir dari kebijakan sekular, tetapi di dalamnya terkandung argumen-argumen yang secara konsisten mempertahankan, bahkan

mengkritik kebijakan tersebut dari dalam. Paradoks inilah yang menjadikan *Hak Dini Kur'an Dili* sebagai objek kajian yang kaya, tidak hanya bagi studi tafsir atau studi Islam di Türkiye, tetapi juga bagi studi komparatif tentang hubungan antara teks keagamaan, penafsir, dan konteks politik di berbagai masyarakat Muslim.

Meskipun topik ini memiliki signifikansi akademis yang jelas, kajian-kajian dalam bahasa Indonesia tentang Hamdi masih sangat terbatas. John M.S. Baljon (1968) mengaku menyesal tidak memasukkan para intelektual Türkiye dalam bukunya *Modern Muslim Koran Interpretation 1880–1960*, sementara Andrew Rippin (2019) juga mengabaikan perkembangan kajian al-Qur'an di Türkiye dalam karyanya *Muslims: Their Religious Beliefs and Practices*. Di antara penelitian dalam bahasa Indonesia yang ada, terdapat kajian Mursyid (2020) tentang deturkifikasi dalam *Hak Dini Kur'an Dili*, Akifahadi (2012) tentang pengaruh modernisasi Türkiye terhadap penafsiran Said Nursi, serta Junaidi (2011) dan Haq dkk. (2023) tentang dinamika Islam dan politik di Türkiye. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis pola respons Hamdi terhadap tiga dimensi kebijakan Kemalis sekaligus, apalagi dengan menggunakan lensa hermeneutika Gadamer sebagai kerangka analitisnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Secara spesifik, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana *Hak Dini Kur'an Dili* merespons tiga dimensi kebijakan politik Türkiye pada masa awal Republik, yaitu (1) proyek penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Turki, (2) penerapan laisisme (*laiklik*) sebagai pemisahan agama dari negara, dan (3) transformasi sistem pemerintahan dari kesultanan ke republik demokratis? Dengan menggunakan hermeneutika Gadamer—khususnya konsep pra-pemahaman (*Vorverständnis*), penggabungan cakrawala (*Horizontverschmelzung*), dan lingkaran hermeneutis (*hermeneutischer Zirkel*)—artikel ini berargumen bahwa respons Hamdi merepresentasikan apa yang akan kita sebut sebagai *resistensi yang dinegosiasikan*: sebuah posisi yang tidak menolak kebijakan Kemalis secara frontal, tetapi secara sistematis membangun kontra-narasi melalui pilihan-pilihan penafsiran yang kumulatif. Selain kontribusi terhadap studi tafsir Türkiye, artikel ini juga menawarkan relevansi komparatif bagi kajian Islam Indonesia dalam konteks misi Jurnal Ufuk.

Tinjauan Literatur

Kajian tentang *Hak Dini Kur'an Dili* dan Elmalılı Hamdi Yazır di kalangan sarjana Türkiye cukup berkembang. Şahin (2015) dalam tesisnya telah menganalisis refleksi kondisi sosial dan politik masa penulisan dalam tafsir tersebut, menunjukkan adanya jejak-jejak sikap Hamdi terhadap modernisasi. Mursyid (2020) dari sisi kajian Indonesia meneliti fenomena “deturkifikasi”—yakni upaya Hamdi untuk mempertahankan warisan Arab-Islam di tengah tekanan turkifikasi budaya—dan menemukan bahwa Hamdi secara konsisten menolak penggantian nama-nama Arab dengan padanan

Türki dalam tafsirnya. Özden (2024) dan Öçalan (2023) mengkaji aspek-aspek spesifik dari metodologi penafsiran Hamdi, termasuk caranya menggunakan pendekatan rasional (*dirāyah*) tanpa meninggalkan fondasi riwayat (*riwāyah*).

Namun, kajian-kajian tersebut umumnya bergerak dalam satu ranah: studi tafsir atau studi sejarah politik. Sangat sedikit yang secara eksplisit menggunakan kerangka hermeneutika untuk membaca pola respons Hamdi. Padahal, hermeneutika—sebagai ilmu tentang bagaimana konteks membentuk interpretasi dan bagaimana interpretasi merespons konteksnya—adalah alat analitis yang paling tepat untuk kasus seperti Hamdi. Inilah yang menjadi justifikasi metodologis utama artikel ini: kerangka Gadamer memungkinkan kita untuk tidak hanya mengidentifikasi *apa* yang direspons Hamdi, tetapi juga *bagaimana* dan *mengapa* ia merespons dengan cara yang ia lakukan, yaitu melalui pilihan-pilihan penafsiran yang terlihat teologis namun memiliki resonansi politik yang kuat.

Dalam konteks studi Islam Indonesia, kajian-kajian yang mengaitkan tafsir dengan konteks politik sebenarnya sudah berkembang, misalnya kajian tentang Hamka dan penafsirannya dalam *Tafsir Al-Azhar* yang ditulis sebagian besar ketika ia dipenjara oleh rezim Soekarno (Federspiel, 1996). Paralel antara kasus Hamdi dan Hamka—dua mufasir besar dari dua negara Muslim yang menghadapi tekanan politik dari negara sekuler—merupakan bidang komparatif yang belum dieksplorasi secara sistematis. Artikel ini, meski tidak membahas Hamka secara mendalam, membuka pintu bagi perbandingan tersebut. Dari perspektif Jurnal Ufuk, studi tentang Hamdi justru relevan sebagai cermin bagi pemahaman kita tentang dinamika serupa di Indonesia: bagaimana ulama merespons kebijakan negara yang berseberangan dengan keyakinan agamanya melalui medium teks keagamaan.

Kerangka Teori: Hermeneutika Gadamer

Pendekatan yang digunakan artikel ini bersandar pada tiga konsep utama Hans-Georg Gadamer dalam karyanya *Wahrheit und Methode (Truth and Method, 1960)*. Pilihan Gadamer sebagai kerangka analitis bukan bersifat kebetulan. Sebagai seorang filsuf hermeneutika yang berargumen bahwa pemahaman selalu bersifat historis dan kontekstual, Gadamer menyediakan perangkat konseptual yang secara langsung relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan: bagaimana penafsir memahami dan merespons teks suci di tengah tekanan konteks politiknya? Tiga konsep utama Gadamer yang digunakan adalah sebagai berikut.

Pertama, pra-pemahaman (Vorverständnis). Gadamer berargumen bahwa setiap penafsir tidak pernah memulai pemahaman dari “nol”; ia selalu tiba dengan apa yang Gadamer sebut sebagai *Vorverständnis*—horison pemahaman yang telah terbentuk oleh tradisi, pengalaman historis, dan konteks sosial sang penafsir. Pra-pemahaman ini bukan hambatan bagi pemahaman yang objektif,

melainkan justru kondisi yang memungkinkan pemahaman itu terjadi (Gadamer, 2006, hlm. 390). Dalam kasus Hamdi, pra-pemahamannya dibentuk oleh tiga lapisan: (1) pendidikan madrasah Utsmani yang memberinya penguasaan mendalam atas tradisi tafsir klasik Sunni, khususnya mazhab Hanafi; (2) pengalaman aktif dalam kehidupan politik—ia pernah menjadi anggota parlemen dan Menteri Yayasan—yang memberinya pemahaman tentang cara kerja kekuasaan; dan (3) posisinya sebagai generasi yang menyaksikan langsung keruntuhan Utsmani dan kelahiran Republik, sebuah pengalaman traumatis yang membentuk sikap defensifnya terhadap tradisi Islam.

Kedua, penggabungan cakrawala (Horizontverschmelzung). Bagi Gadamer, pemahaman tidak terjadi ketika penafsir memaksakan perspektifnya pada teks, atau sebaliknya ketika ia sepenuhnya menyerahkan diri pada teks. Pemahaman terjadi melalui *penggabungan cakrawala*: ketika cakrawala historis teks bertemu dengan cakrawala historis penafsir, menghasilkan sintesis makna yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Dalam konteks Hamdi, yang terjadi adalah pertemuan antara cakrawala teks al-Qur'an yang berdimensi teologis-klasik dengan cakrawala Türkiye modern yang tengah bergerak menuju sekularisme. Ketegangan antara dua cakrawala inilah yang memproduksi respons-respons kritis yang kita temukan dalam tafsirnya. Setiap kali Hamdi menafsirkan sebuah ayat dalam konteks debat tentang bahasa, agama, dan kenegaraan, ia sedang melakukan penggabungan cakrawala: membawa teks ke masa kini, dan membawa konteks masa kini ke dalam pembacaan teks.

Ketiga, lingkaran hermeneutis (hermeneutischer Zirkel). Gadamer mewarisi dari Schleiermacher dan Dilthey gagasan bahwa pemahaman bersifat sirkuler: pemahaman bagian hanya mungkin melalui pemahaman keseluruhan, dan sebaliknya. Dalam aplikasinya pada kajian ini, konsep ini menuntut kita untuk membaca pilihan-pilihan penafsiran Hamdi atas ayat-ayat tertentu bukan secara isolatif, melainkan dalam kerangka keseluruhan proyek tafsirnya dan keseluruhan konteks politik-keagamaan yang melingkupinya. Sebuah komentar Hamdi tentang larangan terjemahan al-Qur'an, misalnya, hanya dapat dipahami sepenuhnya jika kita melihatnya sebagai bagian dari keseluruhan sikap Hamdi terhadap proyek nasionalisasi agama Kemalis, bukan sebagai pernyataan teknis tentang linguistik semata.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pilihan metode ini didasarkan pada sifat objek kajian: sebuah karya tafsir dan konteks historis-politiknya tidak dapat diteliti melalui survei atau eksperimen, melainkan melalui pembacaan mendalam terhadap teks primer dan literatur sekunder yang relevan. Pendekatan hermeneutika Gadamer, sebagaimana diuraikan di atas, berfungsi sebagai kerangka analitis yang memandu proses pembacaan tersebut (Sari, 2020, hlm. 41–53).

Data primer dalam penelitian ini adalah teks *Hak Dını Kur'an Dili* karya Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. Penelitian ini mengacu pada edisi kritis yang diterbitkan oleh T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (2021), dengan editor Asim Cüneyd Köksal dan Murat Kaya. Dari keseluruhan tafsir yang terdiri dari sembilan jilid ini, analisis difokuskan pada tiga bagian yang secara langsung berkaitan dengan tiga tema kebijakan yang dikaji: (1) penafsiran QS. Yūsus 12:2 dan *basmalah* (terkait tema penerjemahan), (2) penafsiran QS. al-An'ām 6:159 (terkait tema laisisme), dan (3) penafsiran QS. al-Kautsar 108:3 (terkait tema transformasi sistem pemerintahan). Pemilihan ketiga ayat ini didasarkan pada kajian Şahin (2015) yang mengidentifikasi bagian-bagian tafsir di mana Hamdi secara paling eksplisit menyentuh isu-isu kontemporer.

Data sekunder mencakup literatur akademis berbahasa Turki, Indonesia, dan Inggris tentang sejarah politik Türkiye, studi tafsir, dan hermeneutika. Analisis dilakukan dalam tiga tahap yang saling terkait secara hermeneutis. Tahap pertama adalah rekonstruksi konteks: membangun pemahaman yang memadai tentang kondisi politik, sosial, dan keagamaan Türkiye pada masa penulisan tafsir (1926–1938). Tahap kedua adalah pembacaan teks: menganalisis pilihan-pilihan penafsiran Hamdi atas ketiga ayat yang dipilih, dengan memperhatikan diksi, strategi argumentasi, dan penanda-penanda intertekstual. Tahap ketiga adalah interpretasi pola: mengidentifikasi pola keseluruhan dari ketiga respons dan mengonstruksinya sebagai argumen teoritis tentang bentuk respons Hamdi terhadap kebijakan Kemalis.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur. Pertama, keterbatasan akses terhadap teks primer: peneliti tidak membaca *Hak Dını Kur'an Dili* dalam bahasa Turki Ottoman aslinya, melainkan mengandalkan edisi modern dan kutipan-kutipan yang terdapat dalam kajian sekunder berbahasa Turki. Kedua, karena tafsir ini mencakup sembilan jilid, kajian ini hanya mampu menelaah bagian-bagian tertentu yang dianggap paling representatif. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır: Biografi dan Konteks Intelektual

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır lahir pada tahun 1878 di distrik Elmalı, provinsi Antalya. Nama “Elmalılı” adalah nisbah (*nisba*) yang merujuk pada kota kelahirannya, sementara “Yazır” adalah nama keluarga yang diambil setelah pengukuhan sistem nama keluarga di Republik Türkiye, merujuk pada desa asal ayahnya. Ayahnya adalah ketua panitera di pengadilan syariah, dan kakeknya berasal dari kalangan ulama Ottoman—latar belakang keluarga yang menempatkan Hamdi dalam jaringan sosial keilmuan Islam sejak kecil. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Elmalı, termasuk menghafal al-Qur'an (menjadi *hāfiẓ*), sebelum pindah ke Istanbul pada usia lima belas tahun untuk melanjutkan pendidikan di madrasah-madrasah utama ibu kota Utsmani (Yavuz, 1995, hlm. 57–62).

Di Istanbul, Hamdi terdidik dalam tradisi keilmuan madrasah Utsmani yang komprehensif: ia menguasai eksegesis al-Qur'an (*tefsir*), teologi (*kalam*), logika (*mantık*), filsafat, hukum Islam (*fikih*), dan sastra Arab dan Turki. Ia juga dikenal memiliki keahlian dalam kaligrafi. Luasnya spektrum keilmuannya menjadikannya bukan sekadar spesialis tafsir, melainkan seorang *âlim* yang utuh dalam pengertian klasik. Setelah menyelesaikan studinya, ia menjadi pengajar di beberapa madrasah dan kemudian menjabat sebagai hakim (*kadi*) di berbagai wilayah Utsmani. Reputasinya sebagai ahli fiqih Hanafi dan mufasir yang cakap membawa namanya ke panggung nasional: ia terpilih sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Antalya dalam parlemen pertama Majelis Besar Nasional Türkiye (1920–1923) dan sempat menjabat sebagai Menteri Yayasan (*Evkaf Nazırı*) selama Perang Dunia I (Uğuz, 2022, hlm. 5–6).

Yang membuat posisi Hamdi sangat menarik secara hermeneutis adalah keterlibatannya dalam kehidupan institusional baik di era Utsmani maupun awal Republik. Ia bukan “ulama pinggiran” yang mudah diabaikan oleh negara, melainkan seorang aktor yang telah menunjukkan kemampuannya bekerja di dalam dan dengan struktur kekuasaan. Latar belakang ini—seorang ulama yang terdidik dalam tradisi Utsmani, berpengalaman dalam politik, dan menyaksikan langsung transisi traumatis dari kekhalifahan ke republik sekuler—membentuk pra-pemahaman (*Vorverständnis*) Hamdi secara sangat khas. Ia adalah *insider* yang bernegosiasi dari dalam, bukan *outsider* yang menolak dari luar.

Karya tafsirnya, *Hak Dini Kur'an Dili*, ditulis selama kurang lebih dua belas tahun atas mandat pemerintah Republik Türkiye dan diselesaikan pada 1938, setahun sebelum kematian Atatürk. Menurut Hasan Basri Çantay (sebagaimana dikutip dalam Öçalan, 2023), karya ini dianggap sebagai tafsir pertama yang ditulis pada era Republik dalam bahasa Turki beraksara Latin. Tafsir ini disusun dengan prinsip-prinsip yang ketat: memperhatikan konteks wahyu (*asbāb al-nuzūl*), tidak bertentangan dengan sepuluh qira'at, menggabungkan pendekatan *riwāyah* dan *dirāyah*, serta berpegang pada tradisi Ahlus-Sunnah dan mazhab Hanafi (Özden, 2024, hlm. 6–8). Fakta bahwa Hamdi sempat ragu untuk menerima mandat ini sebelum akhirnya bersedia—menyadari urgensi situasi—sudah mengindikasikan ketegangan yang akan mewarnai seluruh proses penulisan.

Dinamika Politik Türkiye: Konteks Penulisan Tafsir

Untuk memahami respons Hamdi, kita perlu terlebih dahulu memahami konteks politik yang ia hadapi. Keruntuhan Kesultanan Utsmani dan kelahiran Republik Türkiye bukan sekadar pergantian rezim, melainkan sebuah proyek transformasi peradaban yang merasuk ke setiap aspek kehidupan—termasuk kehidupan beragama. Peralihan ini, yang secara luas dikenal sebagai *tanzimat* (reorganisasi) dalam bentuknya yang paling radikal, melibatkan setidaknya tiga ranah yang saling berkaitan:

hubungan agama-negara, respons terhadap ilmu pengetahuan modern, dan transformasi hak-hak sipil termasuk hak perempuan.

Dalam perjalanannya, dinamika transformasi ini memunculkan tiga arus ideologis yang bersaing di kalangan kaum terdidik Türkiye: Islamisme (*İslamlaşmak*), yang menekankan pembaruan dalam kerangka Islam; Westernisme (*Asrileşmek*), yang mengadopsi modernitas Eropa secara menyeluruh; dan Nasionalisme (*Türkülük*), yang berfokus pada identitas etno-kultural Turki (Gokir, 2013, hlm. 197). Ketiga arus ini bersepakat pada satu hal: kemajuan Türkiye menuju modernitas. Namun mereka berbeda tajam dalam cara menempatkan agama Islam dalam proyek modernisasi tersebut. Arus Kemalis yang akhirnya menang menggabungkan Westernisme dan Nasionalisme, dengan menempatkan Islam sebagai urusan privat yang harus dikeluarkan dari ranah publik dan dikendalikan oleh negara.

Mustafa Kemal Atatürk secara resmi menganut *laisisme (laiklik)*, bukan sekularisme dalam pengertian filosofis yang paling kuat. Ia pernah menyatakan: “Agama adalah masalah hati nurani. Setiap orang bebas untuk menuruti perintah hati nuraninya. Kami menghormati agama. Kami hanya berusaha untuk tidak mencampuradukkan urusan agama dengan urusan kebangsaan dan kenegaraan” (Doğaner & Temel, 2024). Pernyataan ini secara retorik membedakan *laisisme* dari sekularisme: *laisisme* hanya memisahkan agama dari perundang-undangan negara, bukan menghapus agama dari kehidupan publik. Namun pada praktiknya, kebijakan-kebijakan Kemal—penghapusan jabatan Syaikh al-Islam (*Seyülislam*), pembubaran pengadilan syariah, penggantian hukum keluarga Islam dengan hukum perdata Swiss, subordinasi Diyanet di bawah Kementerian—melampaui batas *laisisme* menuju sekularisme substantif (Ertit, 2014, hlm. 103–124).

Dalam konteks inilah proyek penerjemahan dan penafsiran al-Qur’an ke dalam bahasa Turki diinisiasi. Pada Ramadan 1932, pemerintah meluncurkan proyek pembacaan adzan dan khotbah Jumat dalam bahasa Turki—sebuah langkah yang mengguncang masyarakat Muslim Türkiye dan memicu demonstrasi di sejumlah kota, terutama Bursa (Demir, 2018, hlm. 85–103). Proyek adzan berbahasa Turki ini bertahan hingga 1950 ketika larangan adzan berbahasa Arab akhirnya dicabut. Tugas penerjemahan al-Qur’an diamanahkan kepada penyair Mehmed Akif Ersoy, sementara penulisan tafsir berbahasa Turki beraksara Latin dipercayakan kepada Elmalılı Hamdi Yazır (Mursyid, 2020, hlm. 119). Perbedaan antara keduanya menarik: Ersoy pada akhirnya menolak menyerahkan terjemahannya kepada pemerintah setelah menyadari tujuannya, sementara Hamdi menyelesaikan tugasnya meski dengan cara yang penuh nuansa kritis.

Temuan: Tiga Dimensi Respons Tafsir *Hak Dini Kur’an Dili*

Respons terhadap Proyek Penerjemahan al-Qur’an

Respons Hamdi terhadap proyek penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Turki merupakan yang paling eksplisit dan paling mudah diidentifikasi. Dalam penafsirannya atas QS. Yūsuf 12:2—*“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya sebagai al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahaminya”*—Hamdi mengembangkan argumen teologis-linguistik yang komprehensif tentang mengapa al-Qur'an berbahasa Arab tidak dapat dan tidak boleh digantikan oleh terjemahan dalam bahasa lain mana pun (Yazır, 2021, 3:632). Argumen ini bukan sekadar klaim teologis yang berdiri sendiri; dalam konteks Türkiye tahun 1930-an yang sedang mendorong nasionalisasi ibadah, argumen ini memiliki implikasi politis yang langsung.

Inti argumen Hamdi adalah bahwa al-Qur'an diturunkan bukan hanya *maknanya*, tetapi juga *nazam-nya*—struktur, irama, dan keindahan sastra yang membentuk bagian tidak terpisahkan dari teks. Keindahan *i'jāz* (kemukjizatan linguistik) al-Qur'an hanya ada dalam bentuk arabnya; setiap terjemahan, betapapun cermatnya, hanyalah *takrīb al-mā'nā* (pendekatan makna), bukan al-Qur'an itu sendiri. Hamdi kemudian mengilustrasikan argumen ini dengan contoh-contoh konkret tentang kesulitan penerjemahan. Ia menyebutkan bahwa kata *“Allāh”* tidak dapat diterjemahkan menjadi *“Tanrı”* dalam bahasa Turki, karena *“Allāh”* adalah nama diri (*'alam*) yang merujuk secara eksklusif pada Tuhan yang Maha Esa, sementara *“Tanrı”* adalah kata umum yang bisa merujuk pada dewa atau tuhan dalam agama mana pun (Türk Dil Kurumu, 2023). Penerjemahan *“Allāh”* menjadi *“Tanrı”* karena itu secara teologis menyesatkan dan merusak kekhususan konsep tauhid.

Argumen serupa ia kembangkan dalam penafsirannya atas *basmalah* ketika ia menjelaskan perbedaan antara *al-Rahmān* dan *al-Rahīm*. Kedua sifat ini, yang secara literal berarti “Yang Maha Pengasih” dan “Yang Maha Penyayang”, memiliki nuansa teologis yang berbeda dan tidak dapat ditangkap secara memadai oleh padanan dalam bahasa Turki (Yazır, 2021, 1:32–33). *Al-Rahmān* merujuk pada kasih sayang Allah yang universal dan merangkul seluruh makhluk, sementara *al-Rahīm* merujuk pada kasih sayang yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Perbedaan nuansa ini, menurut Hamdi, tidak ada padanannya dalam bahasa Turki, sehingga terjemahan apa pun akan menghasilkan penyederhanaan yang merusak kedalaman teologis teks.

Dari perspektif hermeneutika Gadamer, argumen-argumen Hamdi ini adalah manifestasi *Vorverständnis-nya* yang terbentuk oleh tradisi fiqih Hanafi. Dalam tradisi ini, status hukum al-Qur'an berbahasa Arab sebagai teks yang tidak tergantikan telah mapan sejak lama—sebuah keyakinan yang diwariskan oleh para imam mazhab Hanafi tentang tidak sahnya shalat dengan terjemahan. Pra-pemahaman ini secara organik mengarahkan pembacaan Hamdi ke posisi resistensi teologis terhadap proyek penerjemahan. Paradoks yang menarik adalah bahwa Hamdi melakukan resistensi ini justru di dalam karya yang ia tulis atas mandat proyek tersebut. Ini adalah contoh *Horizontverschmelzung* yang menghasilkan ketegangan produktif: cakrawala teks klasik berbenturan

dengan cakrawala konteks modern, menghasilkan argumen yang secara tidak langsung menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilampaui oleh proyek nasionalisasi agama.

Respons terhadap Laisisme

Respons Hamdi terhadap laisisme lebih tersembunyi dan memerlukan pembacaan yang lebih cermat. Tidak seperti sikapnya terhadap penerjemahan yang cukup eksplisit, kritiknya terhadap pemisahan agama dan negara disampaikan melalui strategi hermeneutis yang lebih halus: pemilihan ayat dan pengembangan analogi yang, bagi pembaca yang peka terhadap konteks, jelas mengacu pada kebijakan Kemalıs.

Dalam penafsirannya atas QS. al-An‘ām 6:159, Hamdi menghadapi frasa “*inna allādīna farraqu dīnahum*” (“sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya”). Alih-alih membatasi penafsiran pada konteks historis klasik tentang perpecahan kaum Yahudi dan Nasrani, Hamdi secara eksplisit mengembangkan analogi kontemporer. Ia menyatakan bahwa ayat ini berlaku juga bagi orang yang berkata: “*Agama adalah masalah pribadi batin dan ruh manusia, tidak berpengaruh kepada jasmaniah dan lahiriahnya. Sekalipun agama mendominasi urusan seseorang, tapi seharusnya tidak dapat mencampuri urusan orang lain; agama adalah satu hal, bangsa adalah hal lain*” (Yazır, 2021, 2:1013–1015). Frasa “*agama adalah satu hal, bangsa adalah hal lain*” adalah parafrase yang sangat dekat dengan retorika laisisme Kemalıs sebagaimana dikutip dari pernyataan Atatürk di atas. Bagi pembaca yang hidup di Türkiye tahun 1930-an, alusif ini tidak mungkin tidak tertangkap.

Hamdi kemudian menyatakan dengan “sedih” (*hüzunla*) bahwa dalam setiap periode keruntuhan umat Islam, perpecahan semacam ini selalu muncul—orang-orang yang memisahkan agama dari pekerjaannya dan membagi diri ke dalam kelompok-kelompok. Ia menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bertanggung jawab atas orang-orang yang memilih jalan tersebut (Yazır, 2021, 2:1013–1015). Penggunaan diksi “*sedih*” dalam konteks ini bukan sekadar ekspresi emosional; dari perspektif hermeneutika Gadamer, ini adalah tanda yang menunjukkan bagaimana *Vorverständnis* Hamdi—yang terbentuk oleh keyakinan bahwa Islam adalah sistem komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya aspek ritual—merasuki penafsirannya dan mendorong ia untuk mengidentifikasi dirinya secara emosional dengan teks yang sedang ia tafsirkan.

Strategi Hamdi di sini sangat cerdas: ia tidak menyebut nama Atatürk atau kebijakan Kemalıs secara langsung—yang akan mengundang sensor dan konsekuensi politik. Sebaliknya, ia membangun paralel hermeneutis antara apa yang dikutuk al-Qur’an (pemisahan agama dari kehidupan) dan apa yang sedang terjadi di Türkiye (pemisahan agama dari negara), dan membiarkan pembaca menarik kesimpulan sendiri. Ini adalah bentuk *resistensi hermeneutis* dalam pengertian yang paling murni:

menggunakan teks suci sebagai “perlindungan” untuk menyampaikan kritik politik yang tidak dapat disampaikan secara langsung.

Respons terhadap Transformasi Sistem Pemerintahan

Berbeda dari dua dimensi sebelumnya yang menunjukkan resistensi (baik eksplisit maupun implisit), respons Hamdi terhadap transformasi sistem pemerintahan dari kesultanan ke republik demokratis menunjukkan pola yang berbeda: akomodasi pragmatis yang dilandasi argumen teologis. Transformasi ini melewati serangkaian tonggak bersejarah: pembukaan Majelis Besar Nasional Türkiye (17 Maret 1920), penghapusan kesultanan (1 November 1922), deklarasi Republik (29 Oktober 1923), dan yang paling traumatis bagi ulama, pembubaran sistem khilafah (3 Maret 1924). Penghapusan khilafah secara teoritis memutus legitimasi teologis sistem pemerintahan Türkiye dalam pandangan banyak ulama Muslim dunia.

Namun dalam penafsirannya atas QS. al-Kautsar 108:3—ayat yang turun merespons ejekan kaum kafir Quraisy bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW terputus karena tidak memiliki anak laki-laki—Hamdi menemukan argumen teologis yang secara tidak langsung melegitimasi perubahan sistem pemerintahan. Ia menyatakan bahwa terputusnya garis keturunan laki-laki dari Rasulullah SAW mengandung dua hikmah ilahi: pertama, menafikan adanya nabi setelah Muhammad SAW (karena banyak nabi yang nasabnya tersambung); kedua, menunjukkan bahwa perwalian (*wilāyah*), imamah, dan kepemimpinan tidak terbatas pada garis keturunan saja (Yazır, 2021, 6:835–836).

Inferensi kedua ini—bahwa kepemimpinan yang sah dalam Islam tidak harus bersandar pada dinasti atau garis keturunan—dalam konteks Türkiye pasca-1924 memiliki implikasi yang jelas: sistem republik yang memilih pemimpin melalui pilihan rakyat tidak secara teologis lebih buruk daripada sistem khilafah yang berbasis dinasti. Bahkan, jika dinasti yang tua (Utsmani) sudah terbukti gagal mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan umat, maka sistem baru yang lebih efektif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hamdi tidak menyatakan ini secara eksplisit, tetapi argumen teologisnya membuka ruang hermeneutis untuk pembacaan tersebut.

Penting untuk ditekankan bahwa akomodasi Hamdi terhadap sistem republik bersifat *pragmatis-teologis*, bukan *ideologis*. Ia tidak menyatakan dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem nilai yang lebih unggul dari sistem Islam, atau bahwa sekularisme adalah jalan kemajuan yang harus diikuti. Ia hanya menemukan dasar teologis yang memungkinkan penerimaan terhadap perubahan yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Dari perspektif Gadamer, ini adalah *Horizontverschmelzung* yang menghasilkan sintesis: cakrawala teks (QS. al-Kautsar) dan cakrawala konteks (sistem republik) bertemu dalam sebuah pembacaan yang tidak mengkhianati teks, tetapi juga tidak menolak realitas kontemporer.

Diskusi

Analisis atas ketiga dimensi respons Hamdi mengungkap sebuah pola yang konsisten dan dapat diartikulasikan sebagai sebuah tesis: *Hak Dini Kur'an Dili* bukan sekadar dokumen keagamaan, melainkan juga sebuah teks politik yang terselubung. Hamdi bernegosiasi dengan kekuasaan melalui bahasa tafsir: ia tidak menolak mandat pemerintah, tetapi dalam penafsirannya ia secara sistematis membangun argumen-argumen yang mempertanyakan, membatasi, atau memodifikasi kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung. Pola ini dapat kita sebut sebagai *resistensi hermeneutis*: resistensi yang tidak berwujud konfrontasi terbuka, tetapi termanifestasi dalam pilihan-pilihan penafsiran yang secara kumulatif membentuk kontra-narasi terhadap hegemoni sekularisme.

Bila kita membaca pola ini melalui lingkaran hermeneutis Gadamer, terlihat koherensi yang kuat antara ketiga dimensi respons. Penolakan terhadap penerjemahan menegaskan bahwa Islam bukan sekadar sekumpulan ide yang dapat dipindahkan ke medium bahasa mana pun—ia melekat pada bentuk linguistik arabnya yang tak tergantikan. Kritik terhadap laisisme menegaskan bahwa Islam bukan agama privat yang dapat dibatasi dalam ranah batin semata—ia adalah sistem komprehensif yang mencakup kehidupan publik. Akomodasi terhadap sistem republik menegaskan bahwa Islam bukan sistem yang mensyaratkan bentuk pemerintahan tertentu (dinasti atau khilafah)—ia adalah seperangkat nilai yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk institusional. Ketiga argumen ini, bila dibaca bersama, membentuk sebuah visi Islam yang organis, komprehensif, dan adaptif—visi yang secara diam-diam menolak reduksi Islam yang diterapkan oleh kebijakan Kemalis.

Dari perspektif teori hermeneutika, kasus Hamdi memberikan contoh yang menarik tentang bagaimana *Vorverständnis* seorang penafsir tidak hanya membentuk pembacaan atas teks, tetapi juga menjadi sumber daya ketahanan terhadap tekanan eksternal. Pra-pemahaman Hamdi yang terbentuk oleh tradisi madrasah Utsmani—dengan penguasaan fiqih Hanafi, teologi Ash'ariyah, dan tradisi tafsir klasik—berfungsi sebagai *benteng epistemologis* yang memungkinkannya untuk tidak tersapu sepenuhnya oleh arus modernisasi. Tradisi yang ia miliki memberikan kepadanya bahasa, argumen, dan otoritas untuk berbicara tentang batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui oleh proyek sekularisasi.

Temuan ini memiliki relevansi komparatif yang signifikan bagi kajian Islam Indonesia, dan secara langsung terkait dengan misi Jurnal Ufuk. Seperti halnya Türkiye pada tahun 1920–1940-an, Indonesia pada berbagai periode sejarahnya juga menghadapi tegangan antara otoritas keagamaan dan kebijakan negara. Pada masa Orde Baru, misalnya, Hamka menulis *Tafsir Al-Azhar* sebagian besar dalam tahanan—sebuah kondisi yang secara langsung membentuk nada dan muatan tafsirnya. Konteks yang berbeda dengan Hamdi, tetapi pola yang serupa: seorang mufasir yang menggunakan

teks al-Qur'an sebagai medium untuk menyampaikan posisi intelektual dan spiritual yang tidak dapat disampaikan secara langsung di ruang publik.

Perbandingan Hamdi–Hamka—dua tokoh tafsir dari dua negara Muslim yang menjadi fokus Jurnal Ufuk—menawarkan sebuah agenda penelitian komparatif yang menjanjikan. Apakah strategi *resistensi hermeneutis* yang kita identifikasi dalam *Hak Dini Kur'an Dili* juga dapat ditemukan dalam *Tafsir Al-Azhar*? Bagaimana konteks politik yang berbeda (Türkiye Kemalis vs. Indonesia Orde Baru) menghasilkan bentuk-bentuk resistensi hermeneutis yang berbeda pula? Pertanyaan-pertanyaan ini berada tepat di jantung kajian Indonesia–Türkiye yang menjadi visi Jurnal Ufuk.

Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa tafsir *Hak Dini Kur'an Dili* karya Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır merepresentasikan tiga dimensi respons yang berbeda namun saling berkaitan terhadap kebijakan politik Türkiye pada masa awal Republik. Terhadap proyek penerjemahan al-Qur'an, Hamdi menunjukkan resistensi teologis yang eksplisit, menegaskan ketidaktergantungan teks Arab melalui argumen linguistik dan teologis yang komprehensif. Terhadap laisisme, ia menyuarakan kritik implisit melalui pemilihan ayat (QS. al-An'ām 6:159) dan pengembangan analogi yang secara hermeneutis paralel dengan retorika kebijakan Kemalis. Terhadap transformasi sistem pemerintahan dari kesultanan ke republik, ia menawarkan akomodasi pragmatis yang dilandasi argumen teologis tentang sifat kepemimpinan dalam Islam.

Pola keseluruhan yang muncul dari ketiga dimensi ini adalah apa yang artikel ini sebut sebagai *resistensi yang dinegosiasikan*: sebuah posisi yang tidak menolak kebijakan Kemalis secara frontal dan tidak menerimanya secara ideologis, melainkan secara sistematis membangun ruang hermeneutis di mana nilai-nilai Islam dapat dipertahankan di tengah tekanan sekularisasi. Melalui lensa Gadamer, pola ini dapat dipahami sebagai hasil dari *Horizontverschmelzung* antara cakrawala teks al-Qur'an yang terbentuk dalam tradisi tafsir klasik dengan cakrawala Türkiye modern—sebuah pertemuan yang tidak menghasilkan penyerapan atau penolakan total, melainkan negosiasi yang terus-menerus.

Selain kontribusinya bagi studi tafsir dan studi Islam di Türkiye, artikel ini membuka beberapa agenda penelitian lanjutan. Pertama, kajian lebih mendalam tentang bagaimana respons tafsir Hamdi mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam Türkiye pasca-1938, khususnya dalam masa transisi menuju demokrasi. Kedua, analisis komparatif antara strategi hermeneutis Hamdi dan mufasir Indonesia yang menghadapi tekanan politik serupa, khususnya Hamka—sebuah perbandingan yang secara langsung relevan dengan misi Jurnal Ufuk untuk mengembangkan dialog akademis Indonesia–Türkiye. Ketiga, eksplorasi konsep *resistensi hermeneutis* sebagai kategori analitis yang lebih luas untuk memahami dinamika tafsir al-Qur'an dalam konteks-konteks Muslim modern yang

menghadapi tekanan sekularisme negara. Dengan demikian, studi tentang Elmalılı Hamdi Yazır bukan hanya memperkaya pemahaman kita tentang Türkiye—ia juga membuka jendela komparatif yang berharga bagi pemahaman kita tentang Islam, tafsir, dan kekuasaan di dunia Muslim kontemporer, termasuk Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada kolega di UIN Raden Fatah Palembang dan STIT Diniyyah Puteri atas diskusi-diskusi yang memperkaya penelitian ini, serta kepada tim editorial dan mitra bestari Jurnal Ufuk atas masukan konstruktif dalam proses revisi.

Kontribusi Penulis

Kontribusi penulis mengacu pada taksonomi CRediT. Konseptualisasi: A.G., Z. Pengumpulan data: A.G. Analisis formal: A.G., Z. Metodologi: A.G, Z. Penulisan – draf awal: A.G. Penulisan – revisi dan penyuntingan: Z. Supervisi: Z. Korespondensi: Z.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dukungan finansial dari lembaga pendanaan mana pun di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

Pernyataan Etika

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik dari komite khusus. Tidak ada data pribadi yang dikumpulkan.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan publikasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Akifahadi, L. S. (2012). Pengaruh modernisasi di Türkiye terhadap penafsiran Bediuzzaman Said Nursi. *Refleksi*, 13(2), 219–262. <https://doi.org/10.15408/ref.v13i2.900>
- Baljon, J. M. S. (1968). *Modern Muslim Koran interpretation 1880–1960*. E.J. Brill.
- Bilgin, M. (1997). Hak dini kuran dili. In *TDV İslâm Ansiklopedisi* (pp. 153–163). Türk Diyanet Vakfı.
- Demir, Ş. (2018). Ezanın Türkçe okunması (1932–1950). In M. Öztürk (Ed.), *Ortak dilimiz ezan* (pp. 85–103). Nida Akademi.
- Doğaner, Y., & Temel, M. (2024). Atatürk ve laiklik. *Atatürk Ansiklopedisi*. <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ataturk-ve-laiklik/>

- Duriana. (2019). Pemikiran politik Türkiye Usmani hingga masa modern. *Radio Science*, 11(2), 54–65. <https://doi.org/10.33477/dj.v11i2.595>
- Ertit, V. (2014). Birbirinin yerine kullanılan iki farklı kavram: Sekülerleşme ve laiklik. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 9(1), 103–124.
- Ersöz, İ. (1993). Elmalılı Hamdi Yazır ve tefsirinin özellikleri. In *Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu* (p. 175). TDV Yayınları.
- Federspiel, H. M. (1996). *A dictionary of Indonesian Islam*. Ohio University Center for International Studies.
- Gadamer, H.-G. (2006). *Truth and method* (J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). Continuum. (Original work published 1960)
- Gokir, N. (2013). Modern Türkiye’de Kur’ana yaklaşımlar. In M. A. Koç & İ. Albayrak (Eds.), *Tefsire akademik yaklaşımlar 2* (pp. 193–220). Ankamat.
- Haq, A. D., Anwar, A., & Sulaiman, U. (2023). Islam sekuler di Türkiye dan pemikiran Kemal Atatürk. *CARITA: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 2(1), 18–32.
- Harahap, H. S. (2019). Pembaharuan pendidikan Islam di Türkiye. *Jurnal Hibrul’ulama*, 1(1), 18–33. <https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/hibrululama/article/view/110>
- Husen. (2018). *Kegagalan pengepungan Wina Habsburg 1683 M dan dampaknya bagi Türkiye Usmani* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40475>
- Junaidi, A. (2011). Kebijakan politik Recep Tayyip Erdoğan dan Islamisme Türkiye kontemporer. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 6(1), 142–200. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1444>
- Mursyid, A. Y. (2020). Deturkifikasi dalam tafsir Hak Dini Kur’an Dili karya Elmalılı Hamdi Yazır. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, 21(1), 111–132. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-06>
- Öçalan, A. (2023). *Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili eseri bağlamında büyük günah anlayışı* [Tesis, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi].
- Özden, Ş. (2024). *Elmalılı’nın Hak Dini Kur’an Dili tefsirinde akıl etmeyle ilgili ayetlere yaklaşımı* [Tesis, Ordu Üniversitesi].
- Rippin, A. (2019). *Muslims: Their religious beliefs and practices* (5th ed.). Routledge.
- Samsuriadi, Santalia, I., & Wahyuddin. (2023). Sejarah lahirnya negara Islam sekuler Türkiye dan ide pembaruan Mustafa Kemal. *Jurnal J-BKPI*, 3(1), 21–31.
- Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Şahin, T. (2015). *Hak Dini Kur’an Dili tefsirinde dönemin siyasi ve sosyal gelişmelerinin yansımaları* [Tesis, Hitit Üniversitesi].
- Şimşek, M. S. (2016). *Günümüz tefsir problemleri*. Kitap Dünyası.
- Türk Dil Kurumu. (2023). *Türk Dil Kurumu sözlükleri*. <https://sozluk.gov.tr/>
- Uçar, D. (2019). *Hak Dini Kur’an Dili tefsirinde manevi huzur* [Tesis, Sakarya Üniversitesi].

Uğuz, F. (2022). *Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın itikadi İslam mezheplerine bakışı (Hak Dını Kur'an Dili örneği)* [Tesis, Akdeniz Üniversitesi].

Yavuz, Y. Ş. (1995). Elmalılı Muhammed Hamdi (1878–1942). In *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Vol. 11, pp. 57–62). Türk Diyanet Vakfı. <https://islamansiklopedisi.org.tr/elmalili-muhammed-hamdi>

Yazıcı, N., & Kısıklı, E. (2024). Atatürk ve Dolmabahçe Sarayı. *Atatürk Ansiklopedisi*. <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ataturk-ve-dolmabahce-sarayi/?pdf=3792>

Yazır, E. M. H. (2021). *Hak dını Kur'an dili* (A. C. Köksal & M. Kaya, Eds.). T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

Zürcher, E. J. (2003). *Sejarah modern Türkiye* (R. Widodo & Wisnu Adi, Trans.). Gramedia Pustaka Utama.
